

## RINGKASAN

Bantuan Pangan Non Tunai adalah program bantuan pangan yang diberikan pemerintah mulai Tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya dengan mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan makanan pokok di e-warung KUBE atau pedagang bahan pangan yang ditunjuk sebagai agen penyalur oleh Himbara. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memberikan pilihan bagi keluarga penerima manfaat dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan telah dibentuk tim koordinasi bansos pangan sebagai pelaksana program BPNT. Adanya mekanisme perubahan mekanisme penyaluran dengan menggunakan mekanisme transaksi elektronik ternyata tidak serta merta menjadikan program berjalan lancar tanpa permasalahan. Salah satu yang terjadi adalah di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Beberapa kepala desa mengeluhkan terkait kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program antara pendamping, Himbara dengan pemerintah desa. Permasalahan yang lain yaitu adanya kegiatan pengumpulan kartu milik KPM yang akan mencairkan BPNT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap serta untuk mengetahui bagaimana peran Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan Kroya dalam pelaksanaan BPNT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan metode *purposive sampling* dan *Snowball Sampling*. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh agar benar-benar dapat dipercaya. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Kroya berjalan baik sesuai dengan Pedoman Umum BPNT, tetapi belum optimal karena ada beberapa hal menyebabkan kurangnya kondusifitas dalam pelaksanaan program. Komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program berjalan cukup baik. Kurangnya kemampuan dan pemahaman dalam transaksi elektronik menyebabkan KPM menjadi tergantung kepada e-warung dalam mencairkan bantuan. Adanya data-data yang belum valid terkait penerima BPNT menjadi kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan distribusi BPNT. Keberadaan tim koordinasi bansos pangan Kecamatan Kroya menjadi sangat penting untuk menjaga iklim dan suasana kondusif dalam pelaksanaan program.

**Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kecamatan Kroya**

## SUMMARY

Non-Cash Food Assistance is a food assistance program provided by the government starting in 2018 to beneficiary families every month with an electronic account mechanism that is used only to buy basic food ingredients at KUBE e-warung or food traders appointed as distribution agents by Himbara. Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) to provide options for beneficiary families in meeting basic daily needs. At the central, provincial, district/city and sub-district levels, a food assistance coordination team has been formed to implement the BPNT program. The existence of a mechanism for changing the distribution mechanism by using an electronic transaction mechanism does not necessarily make the program run smoothly without problems. One of the things that happened was in Kroya District, Cilacap Regency. Several village heads complained about the lack of coordination in program implementation between the facilitator, Himbara and the village government. Another problem is the existence of card collection activities belonging to KPM which will disburse BPNT.

The purpose of this study was to find out how the implementation of the BPNT program in Kroya District, Cilacap Regency and to find out how the role of the Food Social Assistance Coordination Team in Kroya District was in implementing BPNT. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation. Informants were selected by purposive sampling and snowball sampling methods. The validity of the data was tested by triangulation techniques, namely by comparing and rechecking the information obtained so that it was truly reliable. The research data were analyzed by interactive analysis method.

The results of this study explain that the implementation of the BPNT Program in Kroya District is going well in accordance with the General Guidelines for BPNT, but it is not optimal because there are several things that cause a lack of conduciveness in program implementation. Communication and coordination in the implementation of the program went quite well. Lack of ability and understanding in electronic transactions causes KPM to become dependent on e-warung in disbursing assistance. The existence of invalid data related to BPNT recipients is an obstacle that hinders the smooth implementation of BPNT distribution. The existence of a food assistance coordination team in Kroya District is very important to maintain a conducive climate and atmosphere in program implementation.

***Key Words*** : *Non-Cash Food Assistance, Kroya District*